

**EFEKTIVITAS PROGRAM HULU SUNGAI UTARA
MAKMUR PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Penyusunan Skripsi
Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

ISTIQAMAH

NPM : 2022354

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI**

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : ISTIQAMAH

NPM : 2022354

Program Studi : SI Administrasi Publik

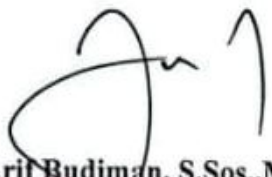
Judul Skripsi : **“EFEKTIVITAS PROGRAM HULU SUNGAI UTARA
MAKMUR PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, April 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Arif Budiman, S.Sos., M.AP
NUPTK. 7950765666130302


Latifah, S.Sos., M.AP
NUPTK. 7433774675230372



Mengetahui,
Ket. Program Studi Administrasi Publik


Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat Beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Program Hulu Sungai Utara Makmur Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara** ”. Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Penulis dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah terlibat dalam penulisan proposal skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP., CIQaR, CIQnR, ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, MA. selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik.
3. Bapak Arif Budiman, S.Sos, M.AP, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis.

4. Ibu Latifah, S.Sos, M.AP, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Amuntai, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
B. Tinjauan Teoritis	12
C. Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Tipe Penelitian	35
D. Data dan Sumber Data	35
E. Desain Operasional Penelitian	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
H. Uji Kredibilitas Data	41
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3. 1 Sumber Data Informan.....	37
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan secara terorganisir melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), BAZNAS telah melaksanakan berbagai program pendayagunaan zakat, salah satunya adalah Program Hulu Sungai Utara Makmur, yang berfokus pada pemberian bantuan modal usaha, pendampingan, serta pembinaan kepada mustahik agar mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi. Berdasarkan laporan kegiatan BAZNAS Kabupaten HSU, program ini telah menjangkau puluhan penerima manfaat yang tersebar di beberapa kecamatan, dengan tujuan mendorong tumbuhnya usaha mikro dan kecil berbasis ekonomi kerakyatan. Selain itu, hasil observasi awal di lapangan menunjukkan bahwa sebagian mustahik telah memanfaatkan bantuan tersebut untuk mengembangkan usaha seperti warung kecil, usaha kuliner, pertanian, dan perdagangan. Namun, terdapat pula penerima yang belum mengalami peningkatan ekonomi secara signifikan.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan bahwa zakat bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Salah satu regulasi yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia

adalah Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Peraturan tersebut menekankan bahwa pendayagunaan zakat harus dilakukan secara produktif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan secara tepat sasaran, adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pendayagunaan zakat diarahkan pada upaya pemberdayaan ekonomi mustahik, baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaan zakat secara produktif diharapkan mampu mendorong mustahik menjadi mandiri bahkan bertransformasi menjadi muzakki di masa mendatang. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan oleh BAZNAS, termasuk Hulu Sungai Utara Makmur, seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip tersebut.

Jika ditinjau dari perspektif teoritis, efektivitas suatu program dapat diukur dari sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas tidak hanya mencakup pencapaian *output*, tetapi juga *outcome* dan dampak yang dihasilkan bagi penerima manfaat. Dalam konteks Program Hulu Sungai Utara Makmur, efektivitas dapat dilihat dari keberhasilan program dalam meningkatkan pendapatan, memperkuat usaha ekonomi mustahik, serta menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Program Hulu Sungai Utara Makmur telah disalurkan kepada masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, termasuk di Kecamatan Amuntai Tengah. Kecamatan Amuntai Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah penerima manfaat program tersebut cukup

banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut menjadi salah satu fokus pendistribusian program pemberdayaan ekonomi oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan adanya kesenjangan antara harapan normatif dengan realitas di lapangan. Beberapa indikasi menunjukkan bahwa tidak semua penerima bantuan mampu mengelola modal usaha secara optimal, masih terbatasnya pendampingan usaha, kurangnya *monitoring* dan evaluasi secara berkala, Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa proses seleksi mustahik belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan dan potensi usaha secara komprehensif. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian bantuan tidak memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan penerima. Hal ini menunjukkan adanya gap antara tujuan program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi dengan hasil aktual yang belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai efektivitas Program Hulu Sungai Utara Makmur menjadi sangat penting untuk dilakukan. Apabila permasalahan dalam pelaksanaan program tidak segera diidentifikasi dan diperbaiki, maka potensi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat tidak akan optimal, bahkan berisiko menimbulkan pemborosan dana umat. Selain itu, ketidakefektifan program dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat efektivitas Program Hulu Sungai Utara Makmur, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta rekomendasi perbaikan bagi BAZNAS

Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya pengelolaan zakat yang lebih profesional, berdaya guna, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat juga menjadi bagian dari peran BAZNAS dalam mendukung keberhasilan program. Dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), BAZNAS dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya para muzaki, sehingga potensi penghimpunan dana zakat semakin meningkat. Peningkatan dana tersebut pada akhirnya akan memperluas jangkauan dan dampak Program Hulu Sungai Utara Makmur.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti diketahui bahwa yang menjadi permasalahan berkaitan dengan Efektivitas Program Hulu Sungai Utara Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara diantaranya adalah:

1. Kurangnya pendampingan terhadap mustahik dalam pelaksanaan program, menunjukkan bahwa pendampingan yang diberikan masih belum optimal dan belum dilakukan secara rutin. Pendampingan yang seharusnya dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga evaluasi usaha, pada kenyataannya belum terlaksana secara maksimal di lapangan. Pendampingan sejauh ini terlaksana setiap 1 bulan mereka hanya diajak menabung dan berinfak ke BAZNAS dan tidak ada pengawasan tentang bantuan program. (*Sumber data dari observasi*)

2. Perkembangan usaha mustahik yang tidak konsisten, beberapa mustahik memang mengalami peningkatan usaha setelah menerima bantuan dari program, namun peningkatan tersebut tidak berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Setelah beberapa waktu, usaha mereka kembali mengalami penurunan, baik dari segi pendapatan maupun keberlangsungan usaha. Hal ini mengindikasikan bahwa bantuan yang diberikan belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Ketidakstabilan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pendampingan, keterbatasan keterampilan usaha, serta minimnya inovasi dalam mengembangkan usaha. Oleh karena itu, tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik belum sepenuhnya tercapai secara optimal. *(Sumber data dari observasi)*
3. Masih terdapat penerima manfaat yang belum merasa puas terhadap program yang dijalankan, pelaksanaan program belum sepenuhnya memenuhi harapan penerima manfaat. Beberapa mustahik menilai bahwa bantuan yang diberikan, baik dari segi jumlah, masih belum sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketidakpuasan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan dan kebutuhan penerima manfaat secara optimal. *(Sumber data dari observasi)*

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Program Hulu Sungai Utara Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **”Efektivitas Program Hulu Sungai Utara Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”**. Maka penelitian ini di Fokuskan pada teori Efektivitas menurut Campbell J.P (2002:96-97) dalam buku (Dr. Muhammad Sawir, S.Sos., M.Si., M.H. 2020:127) yaitu :

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan Sasaran
3. Kepuasan Terhadap Program
4. Tingkat *Input* dan *Output*
5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas program Hulu Sungai Utara Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor- faktor yang memepengaruhi Efektivitas program Hulu Sungai Utara Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui Efektivitas program Hulu Sungai Utara Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor- faktor yang memepengaruhi Efektivitas program Hulu Sungai Utara Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait kajian efektivitas program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi peneliti, Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman peneliti dalam menganalisis efektivitas suatu program.

2) Bagi BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara, Penelitian ini dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi dalam meningkatkan

kinerja Program Hulu Sungai Utara Makmur agar lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

- 3) Bagi Masyarakat (Mustahik), Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai manfaat program Hulu Sungai Utara Makmur serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. **Muhammad Fadhil (2021)** Dengan judul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Program Pesantren Mahasiswa” pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola lembaga dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran dana ZIS dilakukan secara sistematis melalui tahap penghimpunan dana, pendataan dan verifikasi mustahik, hingga penyaluran melalui program pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi produktif. Penyaluran dinilai cukup efektif karena tepat sasaran, tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, yaitu keterbatasan dana yang dihimpun, rendahnya kesadaran masyarakat menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, keterbatasan SDM, dan jangkauan wilayah penyaluran yang masih terbatas. Secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan bahwa penyaluran dana ZIS di BMH Bengkulu telah berjalan cukup efektif, namun masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan sosialisasi, penghimpun dana, dan perluasan program.

2. **Fitri Aulia Rahma** (2021) Dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pada Desa Murung Karangan dan Desa Madang)”. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui informan dengan cara *purposive sampling* berjumlah 15 orang. Setelah data terkumpul dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Dan Uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *member check*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PKH di Kecamatan Muara Harus belum efektif. Pertama, aspek keberhasilan program pada indikator proses dan mekanisme yang dilakukan di lapangan Desa Murung Karangan dan Madang sudah efektif karena terdapat kerjasama antar berbagai pihak dalam penyaluran bantuan. Kedua, aspek keberhasilan sasaran pada indikator pencapaian tujuan belum efektif di Desa Murung Karangan dan Madang komponen kesehatan karena pemberian vitamin serta imunisasi balita belum meningkat dan ibu hamil kurangnya pemberian asupan gizi sehingga adanya anak stunting, sedangkan komponen pendidikan dan kesejahteraan sosial Desa Murung Karangan dan Madang sudah efektif karena sudah tercapainya tujuan yaitu meningkatkan taraf hidup KPM. Ketiga, aspek kepuasan pengguna terhadap kebutuhan dana di Desa Murung Karangan komponen

pendidikan belum efektif karena minimnya jumlah dana bantuan yang didapat, komponen kesehatan dan kesejahteraan sosial sudah efektif. Keempat, aspek tingkat *input* dan *output* pada indikator pencapaian target sasaran Desa Murung Karang komponen kesehatan belum efektif karena target sasaran pada balita yang keluarganya mampu, pada komponen pendidikan dan kesejahteraan sosial sudah efektif, sedangkan Desa Madang komponen kesehatan dan pendidikan belum efektif karena data ibu hamil belum diperbaharui, sedangkan komponen pendidikan target sasaran yaitu keluarga mampu. Kelima aspek pencapaian tujuan menyeluruh pada indikator meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah efektif komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas PKH Desa Murung Karang dan Madang yaitu tidak dilakukannya update data, minimnya anggaran dana, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Untuk meningkatkan efektivitas PKH di Kecamatan Muara Harus, disarankan kepada Kepala Dinas Sosial melakukan koordinasi tentang update data dan jumlah dana komponen pendidikan. Selanjutnya kepada Koordinator pendamping PKH Kecamatan agar melakukan koordinasi tentang penerima PKH yang tidak layak kepada Koordinator Kabupaten. Kemudian Kepala Desa Murung Karang memilih KPM yang tepat dan pembahasan sosialisasi tentang kesehatan serta kepada Kepala Desa Madang segera bertindak tegas dengan KPM yang tidak termasuk kriteria lagi. Adapun masyarakat agar lebih sadar diri lagi tentang pentingnya kesehatan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Frank Jefkins (1995:71), publik adalah sekelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Publik adalah mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau memengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. Publik bisa diartikan sebagai:

1. Umum
2. Masyarakat
3. Negara atau Pemerintahan

Kebijakan publik merupakan suatu peraturan yang ditetapkan dan dibuat oleh orang yang mempunyai kekuasaan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada publik. Jika diibaratkan kebijakan publik merupakan suatu hukum yang harus ditaati, jadi bagi siapa pun yang melanggar akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman sesuai kebijakan yang berlaku. Contoh-contoh kebijakan publik di antaranya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan lain-lain. Kebijakan-

kebijakan tersebut sebelum dikeluarkan tentunya sudah dikaji kebenaran dan ketepatannya sehingga dapat mengatasi isu atau permasalahan secara efektif. Untuk itu ketika ada suatu isu atau permasalahan yang terjadi dan masuk dalam agenda kebijakan dikaji terlebih dahulu dengan pertimbangan-pertimbangan seperti, apakah permasalahan tersebut dianggap dalam masalah yang telah mencapai tingkat kritis, apakah permasalahan tersebut menyangkut banyak pihak dan mempunyai dampak yang luas jika dibiarkan, dan beberapa pertimbangan lainnya.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981) dalam buku Ida Syafriani (2023:2) adalah apapun pilihan Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Bagi Thomas R. Dye, kebijakan publik itu harus mencakup bukan saja apa yang benar-benar diharapkan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu, akan tetapi juga apa yang tidak dilakukannya. Mengapa dikatakan demikian? Karena menurut Thomas R. Dye, baik yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan mempunyai dampak atau konsekuensi yang sama besarnya terhadap masyarakat.

Menurut David Easton dalam buku Ida Syafriani (2023:3) kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses *management*, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.

Menurut Stone (1997) dalam buku Suprayitno, D., dkk. (2024:11) kebijakan publik pada dasarnya merupakan pemikiran

rasional untuk mencapai suatu tujuan yang ideal seperti keadilan, efisien, keamanan, kebebasan dan berbagai tujuan lainnya dari masyarakat itu sendiri.

Peters dalam bukunya yang berjudul *American Public Policy: Promise and Performance* (1966) menyatakan bahwa kebijakan publik memiliki karakteristik tertentu dimana kebijakan tersebut akan dirumuskan, diimplementasikan dan dievaluasi oleh pihak yang berwenang baik itu anggota legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Secara komprehensif kebijakan publik juga diartikan sebagai jumlah kegiatan pemerintah baik yang bertindak secara langsung maupun melalui lembaga-lembaganya mempengaruhi kehidupan warga negara.

Kebijakan Publik merujuk pada serangkaian tindakan, keputusan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting bagi masyarakat atau negara secara keseluruhan. Kebijakan Publik tidak hanya berurusan dengan kepentingan individu maupun kelompok, tetapi juga lebih banyak tujuan umum, kepentingan publik atau warga negara pada umumnya. Tindakan yang diusulkan kemudian diimplementasikan melalui keputusan dan tindakan selanjutnya.

b. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

James Anderson menyampaikan kategori tentang kebijakan publik tersebut sebagai berikut:

- 1) Kebijakan substansif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substantif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural

adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

- 2) Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- 3) Kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*). Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

c. Proses Kebijakan Publik

Ripley dalam buku Ida Syafriani (2023:3-4) Tahapan kebijakan publik digambarkan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Agenda Kebijakan Dalam tahap ini ada 3 kegiatan yang perlu dilaksanakan:
 - a. Membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh kelompok masyarakat yang lainnya atau bahkan oleh para elite politik bukan dianggap sebagai suatu masalah.
 - b. Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.
 - c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.
- 2) Formulasi dan Legitimasi Kebijakan
 Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.
- 3) Implementasi Kebijakan Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.
- 4) Evaluasi terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak Kebijakan Tindakan (implementasi) kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

2. Efektivitas

a. Definisi Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai kesesuaian

penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur utama untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti dapat memberikan hasil, ada pengaruhnya, ada akibatnya, ada efeknya, dapat membawa hasil dan nilai guna.

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai Seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan target (kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau membuat produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan pada akhirnya akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.

Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2018 : 134) dalam (Enny Abadi Joko , A. Arifuddin Mane dan Herminawaty Abubakar. 2022). Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Hani Handoko (2000) dalam (Dedi Amrizal et al, 2018:42) Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Menurut Bastian dalam (Muh. Yusri Abadi, SKM, M. Kes dkk. 2021:1) Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu, hubungan antara *output* dan tujuan. Di mana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Supriyono (CAP, 2021:29) dalam (DR. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M. 2023) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan korelasi dari *output* dari suatu aktivitas dengan tujuan yang akan diharapkan, jika pencapaian tujuan semakin maksimal maka dinyatakan aktivitas tersebut telah diselesaikan dengan efektif.

Menurut Steers (1985:87) dalam (Dr.H.A.Rusdiana,MM 2022:153) mengemukakan bahwa Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor *public* sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

b. Pendekatan terhadap Efektivitas

Pendekatan efektivitas dilakukan dengan bagian yang berbeda di mana akan mendapatkan berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Tujuannya dapat berupa sasaran yang ingin direalisasi oleh *output* yang ingin dihasilkan pendekatan terhadap efektivitas terdiri dari :

1) Pendekatan Sasaran

Pendekatan ini memfokuskan perhatian terhadap keberhasilan dalam mencapai tingkatan yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Tidak hanya tercapainya tujuan/sasaran, faktor waktu pelaksanaan juga selalu digunakan dalam pengukuran efektivitas. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif.

2) Pendekatan Sumber

Pendekatan proses mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya.

3) Pendekatan proses

Pendekatan proses mengungkap efektivitas sebagai definisi dan kondisi kesehatan dari suatu organisasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap berbagai sumber yang dimiliki, yang menggambarkan tingkat efisiensi.

c. Aspek-aspek Efektivitas

Berdasarkan pendapat muasaroh dalam Zainudin (2014) efektivitas dapat dijelaskan bahwa Efektivitas suatu program yaitu :

1) Aspek tugas dan Fungsi

Aspek tugas dan fungsi yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta belajar dengan baik.

2) Aspek Rencana atau Program

Rencana atau program disini adalah rencana pembelajarannya terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dapat dikatakan efektif.

3) Aspek Ketentuan Dan Peraturan

Efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan peserta, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif.

4) Aspek Tujuan atau Kondisi ideal

Suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi atau hasil yang dicapai.

d. Indikator Efektivitas

Indikator efektivitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai. Apabila *output* atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan efektif. Namun sebaliknya dapat dikatakan tidak efektif apabila hasil yang didapat tidak sesuai target sasaran yang ditentukan. Untuk itu diperlukan suatu indikator untuk melihat tingkat efektivitas.

Menurut Campbell J.P dalam buku (Dr. Muhammad Sawir, S.Sos., M.Si., M.H.) pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

a. Keberhasilan program

Dilihat dari pengetahuan terhadap program dan penerapan program yang dilakukan sehingga bisa tercapai tujuan yang telah ditentukan.

b. Keberhasilan sasaran

Keberhasilan suatu sasaran program harus mempertimbangkan target yang diharapkan dari suatu program serta mekanisme atau tahapan pengoperasian program.

c. Kepuasan terhadap program

Semakin berkualitas suatu program yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh penerima program semakin tinggi, dan dapat menimbulkan penilaian yang baik terhadap pembuat dan pelaksana program atau kebijakan tersebut dalam hal ini pemerintah.

d. Tingkat *input* dan *output*

Tingkat masukan (*input*) dan keluaran (*output*) dapat dilihat dari sarana dan prasarana pengelolaan program serta bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan. Jika *output* lebih besar dari *input* maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* maka dapat dikatakan tidak efisien.

e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Dilihat dari sejauh mana bentuk transparansi yang dilakukan dalam penerapan program serta penilaian tentang program tersebut.

Menurut Gibson dkk., efektivitas adalah tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gibson merumuskan indikator efektivitas organisasi sebagai berikut:

- a. Produksi (*Production*), Kemampuan menghasilkan output sesuai target.
- b. Efisiensi (*Efficiency*), Perbandingan antara output dan sumber daya yang digunakan.
- c. Kepuasan (*Satisfaction*), Tingkat kepuasan anggota atau penerima manfaat.
- d. Adaptasi (*Adaptiveness*), Kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.
- e. Pengembangan (*Development*), Kemampuan organisasi untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S. P. Siagian (1978:77), dalam (Dedi Amrizal et al, 2018:51-53) yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai

sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Menurut Duncan dalam (Dedi Amrizal et al, 2018:53) dalam buku “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkret.

- b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

- c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Makmur (2011:7-9) dalam (Dedi Amrizal et al, 2018:55-57) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut:

- a. Ketepatan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- b. Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan satuan biaya merupakan bagian daripada efektivitas.

- c. Ketepatan dalam pengukuran

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran

daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan.

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

e. Ketepatan berpikir

Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

f. Ketepatan dalam melakukan perintah.

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

h. Ketepatan ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Menurut Budiani dalam (Dedi Amrizal et al, 2018:59) untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Ketetapan sasaran program, yaitu sejauhmana keberhasilan peserta program sesuai dengan tepat sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- c. Pencapaian tujuan program, yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

- d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian terhadap peserta program.

Berdasarkan beberapa indikator efektivitas yang diungkapkan menurut beberapa ahli diatas, bahwa teori yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah indikator efektivitas menurut Campbell J.P dalam buku (Dr. Muhammad Sawir, S.Sos., M.Si., M.H.). Alasan peneliti menggunakan teori ini adalah karena keseluruhan indikator efektivitas dalam teori ini sesuai.

3. Pengertian BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara nasional. BAZNAS berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 dan kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS tidak hanya difokuskan pada penyaluran bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif. Hal ini bertujuan agar dana zakat yang disalurkan tidak hanya memenuhi kebutuhan sementara para mustahik, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mereka dalam jangka panjang. Ketentuan mengenai pendistribusian dan pendayagunaan zakat diatur secara lebih rinci dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan kepada delapan

golongan penerima zakat (asnaf) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, pendayagunaan zakat dapat dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun bantuan produktif seperti modal usaha, pelatihan, dan pendampingan usaha. Secara kelembagaan, BAZNAS memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan pengelolaan zakat pada tingkat nasional. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS tidak hanya berada di tingkat pusat, tetapi juga dibentuk di tingkat provinsi serta kabupaten/kota guna menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.

Sebagai lembaga resmi negara, BAZNAS memiliki peran strategis dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai program seperti bantuan pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta pemberdayaan ekonomi produktif, BAZNAS berupaya mendorong mustahik agar dapat bertransformasi menjadi muzaki.

4. Pengertian Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan, setelah memenuhi syarat, sesuai ketentuan syariat. Zakat adalah nama harta yang dikeluarkan manusia dan hak Allah untuk diberikan kepada fakir miskin. Zakat adalah sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan

peningkatan taraf hidup umat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta, khususnya (harta) yang mencapai satu nisab dan genap satu haul untuk diserahkan kepada mustahik.

Yusuf al-Qardawi mengemukakan zakat dengan kemutlakan atas harta yang memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk ditunaikan dan diberikan kepada mustahik atau orang-orang yang berhak menerima. Zakat adalah kewajiban yang diharuskan oleh agama dan negara wajib mengatur dan mengawasi pelaksanaannya. Zakat adalah memberikan harta secara khusus kepada mustahik (orang-orang yang berhak menerima) dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut istilah dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti shalat, puasa, dan lainnya dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan makna zakat di atas dapat dipertegas bahwa zakat merupakan harta milik orang-orang mukmin atau badan milik orang mukmin yang wajib ditunaikan setelah genap satu nisab dan satu tahun atau genap satu nisab dan tiba masa panen dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Harta zakat yang mempunyai aturan tertentu karena di dalam harta orang-orang kaya (muzaki) terdapat harta yang genap nisab dan cukup haul, atau harta yang genap nisab, dan sampai waktu panen.

5. Program

a. Definisi Program

Program menurut bahasa adalah sebuah rancangan yang akan dilaksanakan. Sedangkan menurut istilah program adalah serangkaian petunjuk berupa perintah-perintah yang disusun untuk melaksanakan suatu tugas yang akan dikerjakan.

Menurut Munthe (2015), program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi secara terencana dengan saksama dan terjadi dalam proses kegiatan yang terus berlangsung/berkesinambungan serta melibatkan banyak orang. Definisi ini menekankan bahwa program bukan sekadar satu kegiatan tunggal, melainkan rangkaian aktivitas yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan secara sistematis dalam organisasi.

Menurut Ismail Nawawi (2020) Program adalah seperangkat aktivitas yang disusun secara terencana untuk menyelesaikan masalah tertentu dan mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut Sawir (2021) Program merupakan rangkaian kegiatan yang direncanakan secara sistematis dan terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Program diartikan sebagai rencana atau kerangka kerja yang akan digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan. Program adalah serangkaian kegiatan yang diorganisir dengan baik dalam rangkan mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, program melibatkan perencanaan yang terstruktur dan memiliki tujuan yang spesifik agar hasil pencapaian program tersebut dapat diukur dan dievaluasi. Program juga merupakan elemen penting dalam kerangka kebijakan,

menjadi alat bagi unsur desa dalam upaya memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat.

b. Program Hulu Sungai Utara Makmur

Program Hulu Sungai Utara Makmur adalah inisiatif BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) untuk memberikan bantuan modal usaha kepada para mustahik. Program ini bertujuan memberdayakan ekonomi masyarakat kurang mampu melalui bantuan tambahan modal usaha yang didampingi oleh pihak BAZNAS. Melalui pemberian bantuan modal usaha, Program Hulu Sungai Utara Makmur berupaya mendorong mustahik agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha produktif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, Program Hulu Sungai Utara Makmur sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta diperkuat oleh Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pendayagunaan zakat harus dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang dianjurkan adalah zakat produktif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha atau sarana pendukung kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan bagi mustahik. Program ini tidak

hanya berorientasi pada bantuan konsumtif, bantuan yang langsung habis dipakai tetapi lebih menekankan pada zakat produktif yang bisa menghasilkan manfaat jangka panjang, dengan tujuan mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat. Oleh karena itu, Program Hulu Sungai Utara Makmur dapat dikategorikan sebagai implementasi dari zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi.

Program Hulu Sungai Utara Makmur dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi proses sosialisasi, seleksi calon penerima, penyaluran bantuan modal usaha, serta *monitoring* dan evaluasi, dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan demikian, Program Hulu Sungai Utara Makmur merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang bertujuan membantu mustahik mengembangkan usaha produktif sehingga secara bertahap mampu meningkatkan taraf hidup dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Lebih lanjut, Program Hulu Sungai Utara Makmur mencerminkan prinsip keadilan dan pemerataan dalam pendistribusian zakat sebagaimana diatur dalam regulasi, di mana zakat harus disalurkan kepada pihak yang berhak (*asnaf*) dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan. Dalam hal ini, mustahik yang memiliki potensi usaha namun terkendala modal menjadi sasaran utama program. Dengan pendekatan ini, zakat tidak

hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu mengubah status mustahik menjadi muzakki di masa mendatang. Syarat pendaftaran dan Kriteria penerima Program Hulu Sungai Utara Makmur sebagai berikut :

Syarat-syarat Pendaftaran :

- 1) Fotokopi KTP.
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- 3) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa/kelurahan.
- 4) Surat rekomendasi layak dibantu dari Tokoh Agama/Masyarakat
- 5) Foto usaha sebagai bukti usaha yang dijalankan.

Kriteria penerima program :

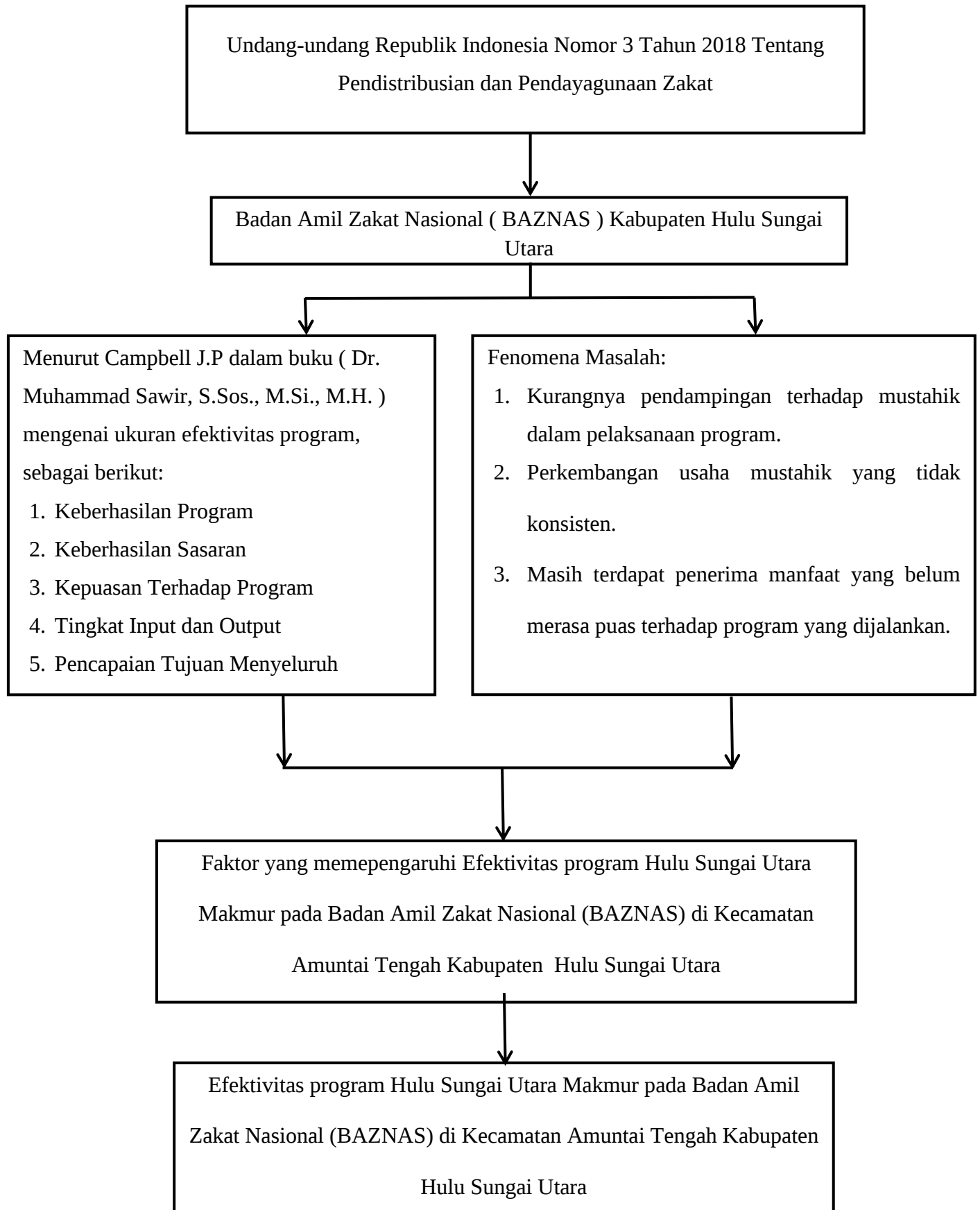
- 1) Berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Utara Dibuktikan dengan KTP/KK yang masih berlaku.
- 2) Termasuk golongan miskin atau kurang mampu Sesuai ketentuan penerima zakat (fakir/miskin).
- 3) Memiliki usaha mikro yang sudah berjalan usaha nyata dan aktif, bukan baru direncanakan.
- 4) Membutuhkan tambahan modal usaha untuk pengembangan atau keberlanjutan usaha.
- 5) Memiliki kemauan untuk berkembang Siap dibina dan mengikuti pendampingan dari BAZNAS.
- 6) Pengajuan dilakukan sendiri (tidak diwakilkan) Calon penerima wajib terlibat langsung dalam proses.

Dengan demikian, Program Hulu Sungai Utara Makmur dapat dipahami sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan zakat yang mengedepankan konsep pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif. Melalui implementasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018, diharapkan program ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, pendistribusian zakat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Peraturan ini menegaskan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan tepat sasaran kepada mustahik sesuai dengan ketentuan delapan asnaf, dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan serta potensi pemberdayaan terkait Efektivitas Program Hulu Sungai Utara Makmur. Efektivitas program ini diukur menggunakan indikator efektivitas menurut Campbell J.P dalam buku (Dr. Muhammad Sawir, S.Sos., M.Si., M.H.) dan memiliki beberapa fenomena masalah, untuk lebih lengkapnya digambarkan dengan skema kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Hulu Sungai Utara yang beralamat di Jalan Negara Dipa No.136, Sungai Malang, Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71418. Lokasi penelitian yang berfokus pada Kecamatan Amuntai Tengah.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Menurut Sugiyono (2022:9) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Moleong, 2016 dalam (Dimas Arjo Sumili dkk 2025:24) Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dalam kondisi alami di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Sampel dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* dan dapat berkembang melalui teknik snowball. Data dikumpulkan dengan pendekatan triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai metode untuk

meningkatkan validitas. Analisis data bersifat induktif, yang berarti teori dikembangkan berdasarkan temuan lapangan. Fokus utama dari penelitian kualitatif adalah memahami makna di balik fenomena yang diamati, bukan sekadar memperoleh hasil yang dapat digeneralisasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud mendeskripsikan dan menguraikan mengenai Efektifitas Program Hulu Sungai Utara Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Melalui pendekatan ini diharapkan peneliti mampu menghasilkan data yang bersifat deskriptif untuk mengungkapkan proses terjadinya di lapangan.

C. Tipe Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:147) penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun buatan manusia, tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu memberikan gambaran atau menyajikan data sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya dengan harapan mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang Efektifitas Program Hulu Sungai Utara Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan kata lain penelitian kualitatif menghasilkan penelitian deskriptif berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan dari orang-orang dan perilaku yang akan dicermati.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti. Dengan kata lain peneliti sendiri yang mengumpulkan data primer. Peneliti mengumpulkannya melalui wawancara, eksperimen, observasi langsung, survei, eksperimen dll. Data primer dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Setelah kebutuhan ini terpenuhi, data mungkin menjadi tidak berguna untuk tujuan lain.

Menurut Sugiyono 2016 dalam (Luh Titi Handayani 2023:14), data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Ada pula pendapat menurut Sugiyono, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung.

b. Data Sekunder

Menurut Purwanto (2022:56) data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Data yang diperoleh dari peneliti lain atau dari catatan instansi, atau dari mana saja sudah diolah, merupakan data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek di mana data itu diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data disebut informan orang yang memberikan respon atau menjawab pertanyaan, tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan

observasi maka sumber datanya bisa berupa benda atau proses tertentu. Apabila menggunakan dokumentasi maka sumber datanya dokumentasi catatan. Dalam hal ini penelitian memilih informan yang dianggap mengetahui masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya sebagai sumber data berikutnya.

Sumber data yang digunakan peneliti adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* bertujuan untuk pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan penelitian mengenai objek atau suatu informasi yang didapatkan yang diteliti.

Teknik ini juga sebagai penentuan informan dengan pertimbangan tertentu yang dimaksudkan adalah informan penelitian dianggap paling tahu sehingga akan memudahkan peneliti menguasai objek/situasi sosial yang akan diteliti agar diperoleh data yang representatif.

Dalam penelitian ini mengetahui informan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Sumber Data Informan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua BAZNAS HSU	1 Orang
2.	Kepala Pelaksana BAZNAS HSU	1 Orang
3.	Bagian Pendayagunaan	1 Orang
4.	Staff Pendamping Hulu Sungai Utara Makmur	1 Orang

5.	Masyarakat (Mustahik) Penerima bantuan modal usaha	9 Orang
Total jumlah informan		13 Orang

Sumber : Dibuat Peneliti 2026

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian adalah alat bantu untuk melakukan penggalan informasi tentang variabel yang sedang diteliti. Instrumen merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan penelitian karena perolehan suatu informasi atau data relevan tidaknya, tergantung pada alat tersebut.

Desain operasional penelitian ini adalah Efektivitas Program Hulu Sungai Utara Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menjadi acuan dasar untuk penelitian nanti, menggali data lebih dalam.

Diukur menggunakan indikator efektivitas menurut Campbell J.P dalam buku (Dr. Muhammad Sawir, S.Sos., M.Si., M.H.). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Efektivitas Menurut Campbell J.P dalam buku (Dr Muhammad Sawir, S.Sos., M.Si., M.H.)	1. Keberhasilan Program	a. Pengetahuan terhadap program b. Penerapan program
	2. Keberhasilan Sasaran	a. Ketepatan sasaran penerima program b. Peningkatan usaha mustahik
	3. Kepuasan Terhadap Program	a. Kepuasan terhadap program b. Kualitas program
	4. Tingkat Input dan Output	a. Sarana dan prasarana b. Pertanggungjawaban
	5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh	a. Kemandirian ekonomi mustahik b. Keberlanjutan usaha

Sumber : Dibuat Peneliti 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2022:104) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan

data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

Menurut Nasution dalam (Sugiyono, 2022:106) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data dikumpulkan sering dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (*proton* dan *elektron*) maupun sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

2. Wawancara

Esterberg dalam (Sugiyono, 2022:114) Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan, dan jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dapat dilakukan, baik secara langsung, maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara langsung diadakan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengannya untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Wawancara tidak langsung dilakukan terhadap seseorang yang dimintai keterangan tentang orang lain. Dengan wawancara dapat dikaji lebih dalam mengenai informasi dari permasalahan yang telah diambil untuk ditarik kesimpulan dari berbagai sumber.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2022:240) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2022:130) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono 2018:337) mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu cukup banyak dan dalam bentuk yang tidak seajek data kuantitatif. Oleh karena itu dapat dilakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka tahap selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data agar memiliki visibilitas yang lebih jelas. Penyajian data yang dimaksud di sini dapat sesederhana tabel dengan format yang rapi, grafik, chart, piktogram, dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Uji Kredibilitas Data

Sugiyono (2022:186-193) Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis negatif dan *member check*.

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Sehingga hubungan peneliti dengan narasumber terbuka *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk *rapport*, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, di mana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.

2. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

Dengan meningkatkan ketekunan tersebut, maka peneliti akan melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak. Sehingga, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

4. Analisis kasus negatif

Analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya. Hal ini sangat tergantung seberapa besar kasus negatif yang muncul tersebut.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.

6. Mengadakan *member check*

Member check adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi Joko, E., Mane , A. A., & Abubakar, H. (2022). *Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam peningkatan pajak daerah*. Makassar: Chakti Pustaka Indonesia
- Abadi, M. Y., Marzuki, D.S., Rahmadani, S., Fajrin, M. A., HR, A. P., Afifah, & Juliarti, R. E. (2021). *Efektivitas kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19 pada pekerja sektor informal di Kota Makassar*. Uwais Inspirasi indonesia.
- Amrizal, Dedi, dkk. 2018. *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Ananda, R., Amiruddin, & Hamidah. (2025). *Variabel kerja (kompilasi konsep)*.
- Anonim. (2011). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*
- Anwar, N. (2022). *Manajemen pengeloan zakat*. Bogor: Lindan Bestari.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2018). *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*. Jakarta: BAZNAS.
- Fadhil, M. (2021). *Analisis Efektivitas mekanisme Penyaluran dana Zakat, infaq, dan shadaqah pada BMH Kota Bengkulu*. Skripsi. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Fitri Aulia Rahma (2021) Dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pada Desa Murung Karangan dan Desa Madang)”.
- Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., & Donnelly, J.H. (2017). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Handayani, Luh Titi. (2023). *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)*. Jakarta: PT. Scifintech Andrew Wijaya Medan: Umsu Press.

- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Rusdiana, H. A. (2022). *Manajemen kewirausahaan kontemporer: Pendekatanteori dan praktik* (Cetakan IV). ARSAD Press.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi pelayanan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Siregar, B. G., Lubis, A., & Hasibuan, A. A. (2023). *Efektivitas program dana desa menuju desa maju*. Bogor: Bypass.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: CV. Alfaberta.
- Sumilih, D. A., dkk. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: PT Star Digital Publishing.
- Suprayitno, D., dkk. (2024). *Buku ajar kebijakan publik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Syafriyani, Ida. (2023). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Tim Penyusun. (2022). *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi Administrasi Publik*. Amuntai: STIA Amuntai.
- Yusuf, D. N., & Qomariah, S. N. (2021). *Analisis kelayakan usaha tanaman hias pada Brother Farming di era new pandemi COVID-19 di Dusun Sukotirto Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang*. Jombang: Fakultas Pertanian, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.